

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Bencana

2.1.1 Pengertian Bencana

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sementara Asian *Disaster Preparedness Center* (ADPC) mendefinisikan bencana dalam formulasi *“The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the effected communities to cope using their own resources”* (Abarquez & Murshed, 2004). Dari pengertian bencana di atas mengandung tiga aspek, diantaranya ialah:

1. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*).
2. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan dan fungsi dari masyarakat.
3. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Tinjauan mengenai bencana dalam penelitian digunakan sebagai panduan penjelasan mengenai pengertian bencana dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya untuk panduan dalam menyajikan istilah-istilah mengenai kebencanaan dalam pembahasan.

2.1.2 Bencana Lumpur Sidoarjo

Banjir Lumpur panas Sidoarjo, yang juga dikenal sebagai sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi), merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei 2006. Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni

kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Menurut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), rata-rata volume lumpur yang menyembur berkisar 10.000 hingga 15.000 meter kubik per hari.

Tinjauan mengenai Bencana Lumpur Sidoarjo digunakan sebagai gambaran terkait Bencana Lumpur Sidoarjo mengenai penjelasan Bencana Lumpur Sidoarjo, kapan terjadinya bencana dan lokasi bencana yang digunakan dalam pembahasan serta jangkauan dampak Bencana Lumpur Sidoarjo.

2.2 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke titik tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang dimaksud limbah adalah segala macam sisa dari adanya suatu kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi baik untuk kegiatan produksi lebih lanjut, untuk konsumsi maupun untuk distribusi, dan sisa tersebut kemudian dibuang ke badan air, udara ataupun tanah (Suparmoko, 2000).

Pada saat kegiatan manusia masih terbatas baik karena jumlah penduduk yang masih relatif kecil ataupun karena teknologi yang masih belum berkembang, kegiatan eksploitasi atau pengambilan barang sumberdaya alam belum begitu banyak dan limbah yang terbuang ke alam juga masih terbatas, maka lingkungan masih dapat menampung dan mengasimilasi limbah sehingga belum terjadi pencemaran. Dengan kata lain daya tampung lingkungan masih memadai. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan (Suparmoko, 2000:10). Berkembangnya jumlah penduduk dan peningkatan jumlah dan macam kebutuhan manusia serta meningkatnya teknologi untuk memenuhi kebutuhan

manusia tersebut, maka volume limbah yang terbuang ke dalam lingkungan terus meningkat.

Pencemaran lingkungan akan sangat terasa dampaknya pada ketidaknyamanan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Memburuknya kualitas air jika air itu tercemar oleh zat-zat yang tidak cocok untuk peruntukannya tentu akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Misalnya sumber daya air dapat tercemar karena adanya limbah minyak atau oli bekas maupun merkuri yang terkandung dalam baterai bekas yang dibuang ke dalam tanah atau ditimbun. Hal ini akan mengurangi fungsi tanah sebagai sumber daya utama di sektor pertanian dan kesuburan tanah akan menurun. Lebih jelas lagi jika limbah itu dibuang langsung ke badan air atau udara ambien yang akan langsung dimanfaatkan oleh manusia baik untuk air minum dalam hal sumberdaya air ataupun untuk bernafas dalam kasus sumber daya udara. Hal ini akan sangat mengganggu kenyamanan hidup, mengurangi tingkat kesehatan dan meningkatkan biaya pemeliharaan dan biaya kesehatan bagi manusia.

Tinjauan mengenai pencemaran lingkungan digunakan sebagai pedoman mengenai definisi pencemaran serta jenis-jenis pencemaran, sehingga akan diketahui batasan pengertian dan jenis pencemaran lingkungan yang digunakan dalam penelitian.

2.3 Sektor Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasarannya yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Pengembangan sektor perikanan tidak hanya terkait dalam usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya saja. Perikanan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya dan/atau

mengolahnya untuk kebutuhan manusia akan pangan sebagai sumber protein dan non pangan (pariwisata, ikan hias dan lain-lain) (Hakim, 2010).

Menurut Erwandi dan Syafri dalam Hendri (2010) peluang bisnis kelautan dan perikanan setidaknya dapat dilihat dari dua faktor yaitu (1) faktor internal berupa potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi sumber daya manusia, teknologi, sarana dan prasarana serta pemasaran, dan (2) faktor eksternal yang berkaitan dengan aspek permintaan produk perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan tersebut dalam rangka persaingan.

2.3.1 Perikanan Tangkap

Menurut Sudirman dan Achmar Mallawa, Teknik Penangkapan Ikan, 2004 Dalam Hakim (2010) pengertian penangkapan (*fishing*) adalah usaha melakukan penangkapan ataupun pengumpulan ikan dan jenis-jenis *aquatic resources* lainnya, dengan dasar pemikiran bahwa ikan dan *aquatic resources* tersebut mempunyai nilai ekonomi.

Berdasarkan Undang-undang 45 tahun 2009, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Sedangkan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Perikanan tangkap mempunyai peranan penting dalam menopang ketahanan pangan di Indonesia, terutama dalam hal penyediaan ikan. Sebagai salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat, ikan telah menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan. Semakin meningkatnya konsumsi ikan per kapita, menyebabkan kebutuhan terhadap ikan juga mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan kegiatan produksi perikanan tangkap juga meningkat pesat. Akan tetapi, tingkat produksi perikanan tangkap yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik pada akhirnya dapat berakibat buruk yaitu terkurasnya sumberdaya ikan sehingga semakin lama produksi ikan juga akan mengalami penurunan dan menjadi tidak berkelanjutan. Jika hal ini terjadi, maka ketahanan pangan menjadi terancam.

Menurut Naamin (1987) dalam Hakim (2010) sumber daya perikanan laut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

1. Sumber daya ikan damersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan;
2. Sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis sumber daya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan;
3. Sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan *oceanik* seperti tuna, cakalang dan tenggiri;
4. Sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut.

2.3.2 Perikanan Budidaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang baik, maka definisi budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetannya. Tambak adalah wilayah yang dibentuk manusia untuk pemeliharaan ikan dan udang. Istilah tambak atau empang digunakan untuk menunjuk pada kolam yang dibuat manusia di pinggir pantai yang diisi dengan air laut atau air payau (campuran air laut dan air payau) (Tancung, 2007).

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air. Istilah akuakultur yang diambil dari istilah dalam Bahasa Inggris *Aquaculture*. Definisi akuakultur menurut beberapa sumber. Akuakultur merupakan suatu proses pembiakan organisme perairan dari mulai proses produksi, penanganan hasil sampai pemasaran (Wheaton, 1977). Akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi (Bardach, dkk., 1972). Akuakultur merupakan

proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia (*Webster's Dictionary*, 1990). Pengembangan pada perikanan budidaya dapat dilakukan pada (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010):

1. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, moluska dan rumput laut;
2. Budidaya air payau;
3. Budidaya air tawar yang terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa), kolam air tawar dan mina padi sawah.

2.3.3 Tenaga Kerja Sektor Perikanan

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut (Subri, 2003). Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dan menduduki posisi sentral dalam melakukan produktivitas dan kinerja suatu industri pengolahan, termasuk pengolahan ikan. Ketenagakerjaan merupakan aset perusahaan yang paling berharga dan terpenting, mengingat peran dan fungsinya sebagai *value creating*, diversifikasi produk olahan serta pengembangan manfaat teknologi agar industri mampu selalu menghasilkan produk yang mengikuti dinamika perubahan pasar Arthajaya (2008) dalam Putra (2011).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan dibagi pada kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta jasa penunjang lainnya yang meliputi tenaga kerja yang terlibat pada program-program pemberdayaan di sektor perikanan.

Tinjauan mengenai sektor perikanan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan dalam penelitian terkait istilah-istilah perikanan yang digunakan, untuk mengetahui batasan dalam pembahasan perikanan darat/budidaya dan untuk mengetahui karakteristik tenaga kerja dalam sektor perikanan, karena responden dalam penelitian ialah masyarakat yang bekerja pada sektor perikanan.

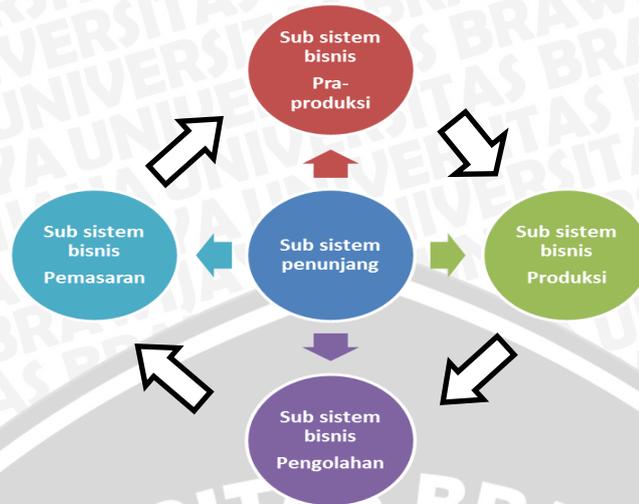
2.4 Sistem Kegiatan Agribisnis Perikanan

Sistem usaha atau kegiatan perikanan pada dasarnya menggunakan prinsip ekonomi dalam memanfaatkan 4 faktor produksi yaitu sumberdaya, modal, tenaga kerja dan manajemen dalam usaha di bidang perikanan. Sistem kegiatan atau usaha perikanan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh perikanan dalam mengorganisasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Tcahyono, 2012).

Manajemen usaha perikanan merupakan proses pengambilan keputusan dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas ke dalam alternatif produksi untuk diorganisasikan seperti dalam kegiatan usaha sehingga tercapai tujuan tertentu. Manajemen usaha perikanan diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: berapa banyak barang yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan macam barang apa saja yang akan diproduksi (Tcahyono, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Perikanan, usaha atau sistem perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Berikut gambaran perikanan sebagai sebuah sistem (sistem bisnis perikanan).



Gambar 2. 1 Sistem Bisnis/Kegiatan Perikanan

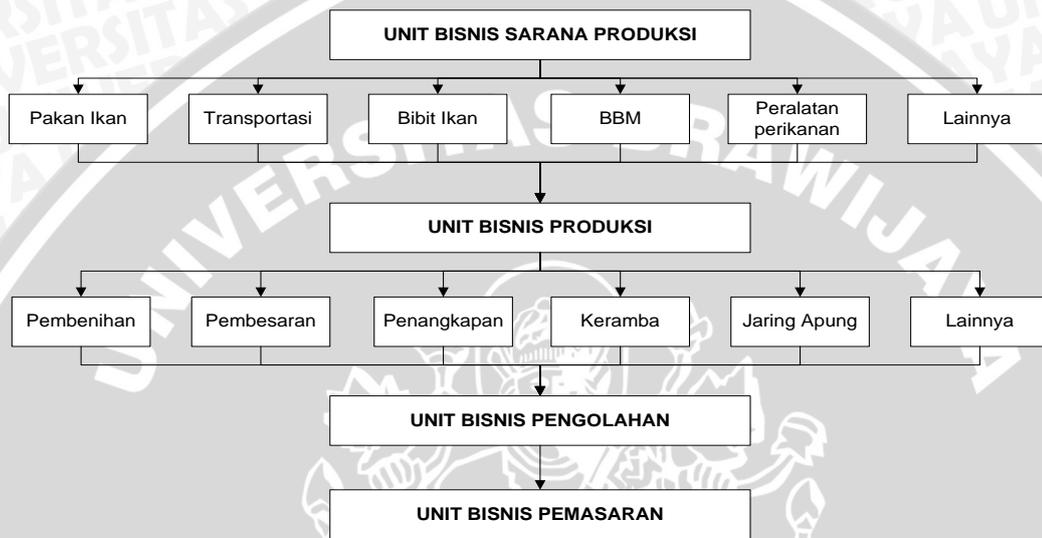
Menurut Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009, yang dimaksud sistem usaha perikanan adalah sistem usaha yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pengertian sistem kegiatan atau usaha perikanan masuk ke dalam pengertian agribisnis. Elemen yang ada dalam sistem atau usaha perikanan terkandung di dalam pengertian agribisnis sebagai keseluruhan operasi yang terkait dengan usaha untuk menghasilkan usaha tani, untuk pengolahan dan pemasaran. Agribisnis mengandung pengertian bisnis yang berbasis pertanian dalam pengertian kompleks, meliputi bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Praktek dalam bisnis pertanian tidak akan sukses dalam jangka panjang jika tidak dilakukan secara terpadu, yang dimaksud terpadu ialah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara rantai agribisnis hulu sampai hilir serta keterpaduan atau koordinasi diantara lembaga pemerintah dalam menangani agribisnis sehingga mendukung praktek agribisnis itu sendiri (Abidin, 2013).

Agribisnis terdiri dari tiga sektor utama yang secara ekonomi saling menguntungkan satu sama lain, yaitu sektor input (faktor produksi/masukan), proses (produksi/farm/budidaya/penangkapan ikan) dan sektor output (hasil produksi/panen/produk). Sektor input dalam agribisnis terdiri dari penyediaan perbekalan bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan dan peternak secara berturut-turut untuk dapat memproduksi hasil produksi pertanian, menangkap ikan, membudidayakan ikan dan memproduksi ternah. Contoh perbekalan ialah

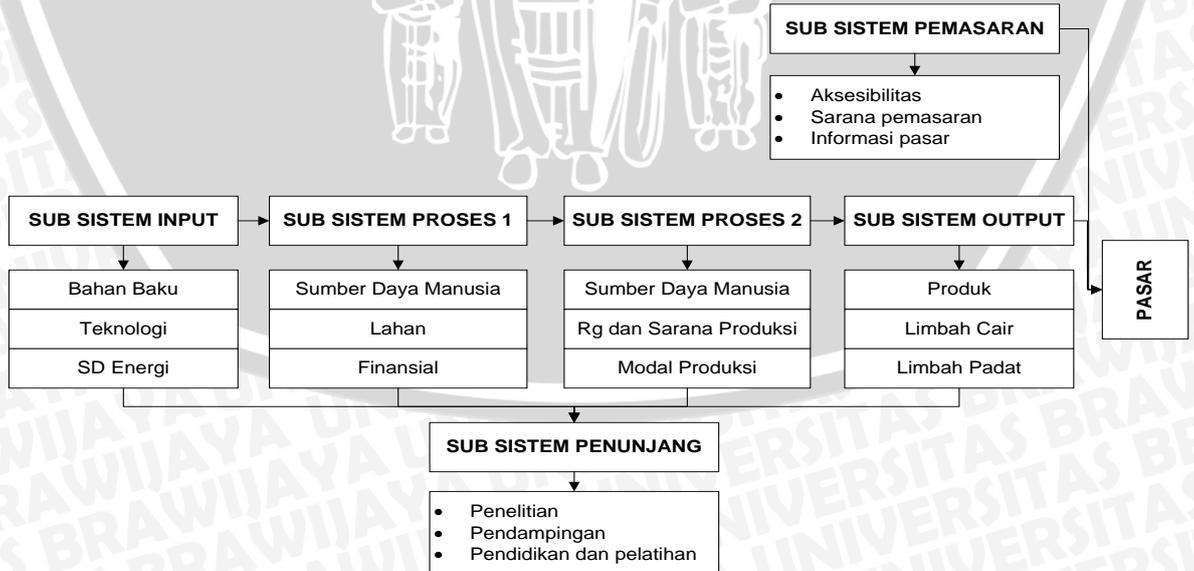
pupuk, bibit, bahan kimia, mesin pertanian, sejumlah uang untuk pendanaan, tenaga kerja, peralatan (Abidin, 2013).

Agribisnis dapat dibagi ke dalam 3 usaha besar yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu unit usaha saprodi (sarana produksi), unit usaha produksi dan unit usaha pemasaran (Primyastanto, 2014). Berikut akan dijelaskan oleh bagan pada **Gambar 2. 2 Manajemen Agribisnis Perikanan**



Gambar 2. 2 Manajemen Agribisnis Perikanan (Primyastanto, 2014)

Sistem aktivitas atau kegiatan dalam pengembangan wilayah terutama pada sektor perikanan akan digambarkan pada bagan berikut:

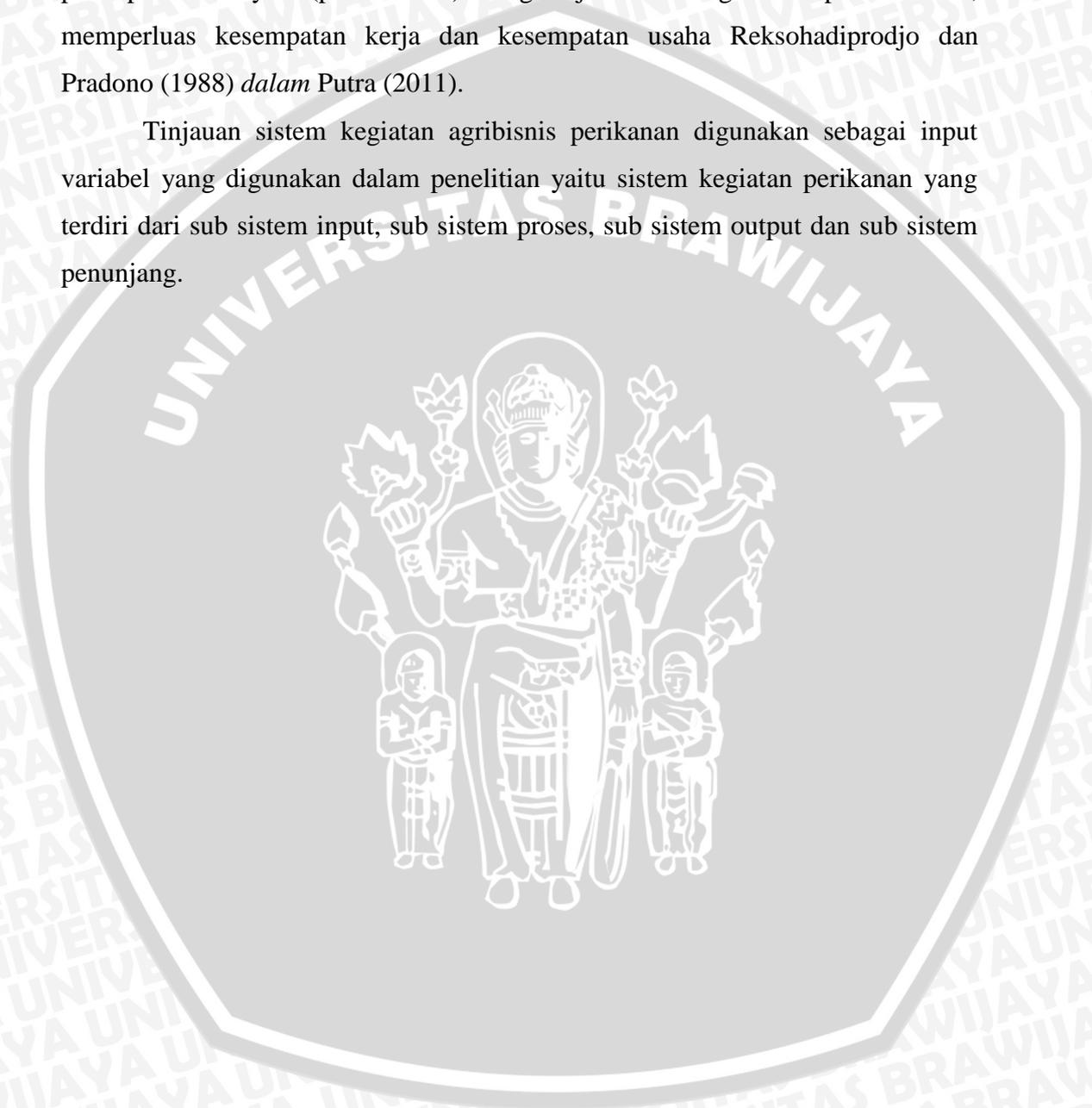


Gambar 2. 3 Sistem Kegiatan Perikanan (Wicaksono, 2014)



Agribisnis perikanan mencakup input, industri pemrosesan komoditas, manufaktur dan industri makanan, serta perusahaan yang memfasilitasi operasi termasuk broker, bankir iklan instansi, dan informasi pasar perusahaan (Ed. William A. Darity, 2008). Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan (petani ikan) dengan jalan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha Reksohadiprodjo dan Pradono (1988) dalam Putra (2011).

Tinjauan sistem kegiatan agribisnis perikanan digunakan sebagai input variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu sistem kegiatan perikanan yang terdiri dari sub sistem input, sub sistem proses, sub sistem output dan sub sistem penunjang.



2.5 Studi Terdahulu

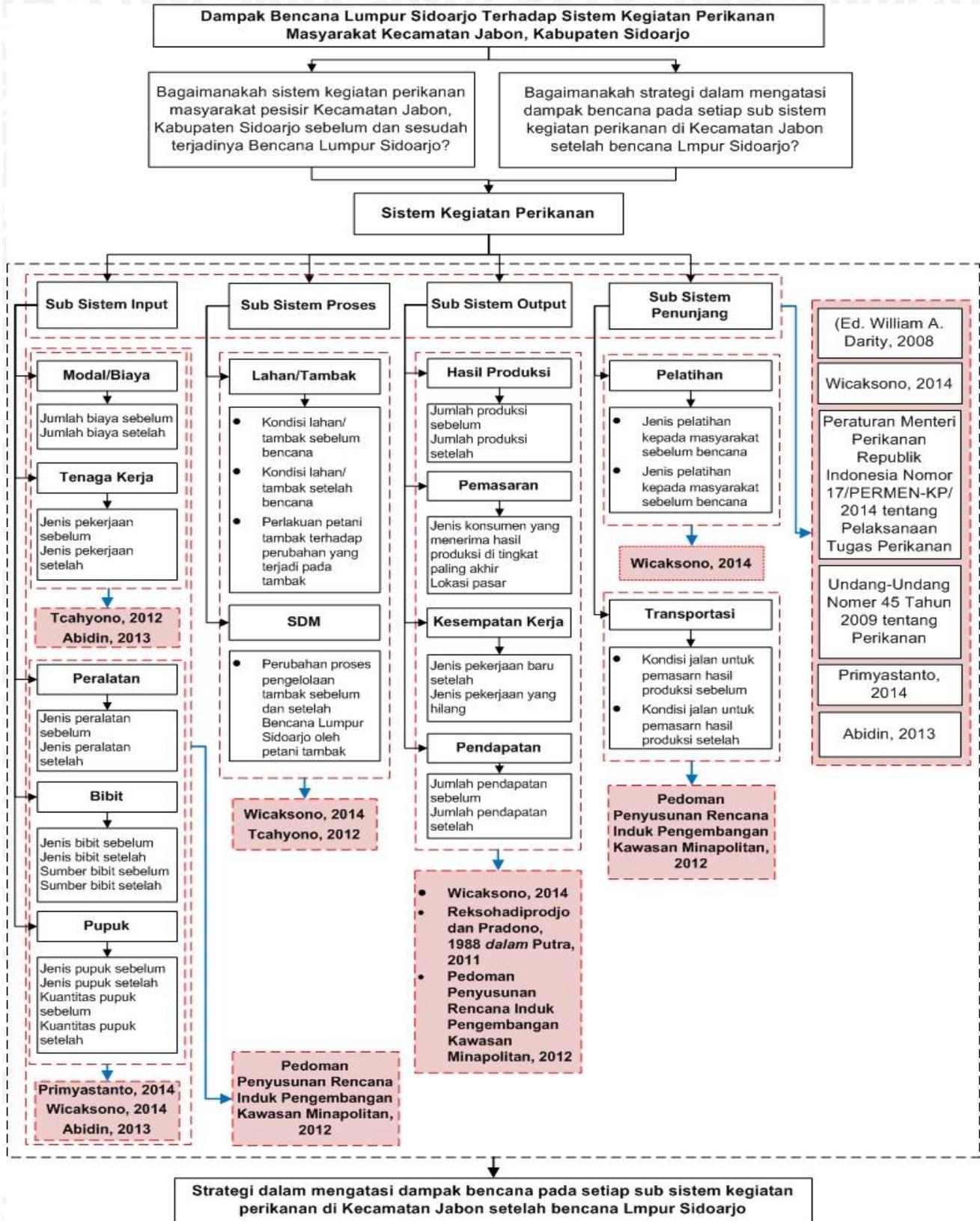
Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil	Kontribusi dalam penelitian
Yuniar, 2010	Arahan Pemanfaatan Ruang Pesisir Terkait Pencemaran Kali Porong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah pesisir. 2. Menganalisis dampak pencemaran Kali Porong terhadap kondisi fisik, sosial dan ekonomi wilayah pesisir. 3. Memberikan arahan pemanfaatan ruang pesisir terkait pencemaran Kali Porong di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis karakteristik wilayah pesisir • Analisis kemampuan lahan • Analisis daya dukung lingkungan • Analisis sumber pencemaran • Analisis tingkat pencemaran • Analisis identifikasi dampak • Analisis penilaian dampak 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tambak • Produksi perikanan tambak • Produktifitas tambak • Nilai produksi perikanan tambak • Pendapatan masyarakat • Ketersediaan lapangan kerja • Mata pencaharian masyarakat • Biaya hidup masyarakat • Tingkat kesejahteraan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pesisir Kecamatan Jabon merupakan daerah landai yang memiliki bagian muara sungai sehingga karakteristik fisik wilayah pesisirnya dipengaruhi oleh kondisi topografi tersebut. • Pencemaran kali porong telah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, produktifitas perikanan tambak dan kehidupan masyarakat. • Arahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Jabon meliputi: (1) Zona Perlindungan (2) Zona pemanfaatan terbatas (3) Zona Budidaya 	Lokasi dan tujuan dari penelitian memiliki tujuan yang hampir sama dengan penelitian Dampak Lumpur Sidoarjo, sehingga dijadikan sebagai referensi tingkat dampak Lumpur Sidoarjo pada sektor perikanan saja.
Giyarsih, 2012	Identifikasi Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk Bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta Terhadap Bencana Lahar Merapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi tingkat kerentanan sosial ekonomi beserta persepsi dan kapasitas penduduk di bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta. 2. Menganalisis korelasi antara tingkat kerentanan sosial 	Metode analisis deskriptif kualitatif: Analisis kerentanan sosial ekonomi dan analisis korelasi dengan <i>Spearman Corellation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel kerentanan sosial ekonomi antara lain pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, jumlah anak dalam keluarga, jumlah lansia, jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kerentanan sosial ekonomi penduduk di bantaran Sungai Code cenderung pada tingkat rendah. • Persepsi dan kapasitas masing-masing berada pada kategori kelas tinggi yang berarti telah terbangun dengan baik. • Korelasi antara variabel kerentanan sosial ekonomi dengan persepsi dan kapasitas berada pada tingkat 	Analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi tingkat kerentanan sosial ekonomi beserta persepsi dan kapasitas penduduk di bantaran Sungai Code. Dalam analisis ini terdapat korelasi

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil	Kontribusi dalam penelitian
		ekonomi, tingkat persepsi dan tingkat kapasitas penduduk di bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta dalam menyikapi bencana aliran lahar.		wanita dalam keluarga, penguasaan bangunan dan waktu domisili.	korelasi berbanding terbalik dan cenderung lemah	antara tingkat kerentanan sosial ekonomi, tingkat persepsi, dan tingkat kapasitas penduduk di bantaran Sungai Code dalam menyikapi bencana aliran lahar. Sehingga penelitian ini berkontribusi identifikasi dampak dari bencana terhadap masyarakat.
Choirul, 2009	Dampak Bencana Banjir Terhadap Potensi Usaha Ekonomi UMKM di Kabupaten Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak banjir terhadap aktivitas UMKM di Kabupaten Situbondo 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi UMKM pasca banjir untuk bangkit kembali 3. Menganalisa berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten dan perbankan Situbondo dalam rangka pemulihan UMKM di 	Metode yang digunakan untuk penelitian ialah Deskriptif Kuantitatif.	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Sektor usaha mikro • Sektor usaha kecil • Sektor usaha menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap aktivitas dan keberadaan pelaku UMKM di Kabupaten Situbondo • Permasalahan utama pelaku UMKM pasca bencana banjir Situbondo adalah keterbatasan permodalan dan akses sumber pendanaan. • Aktivitas kegiatan usaha UMKM yang terdampak bencana banjir sampai dengan pendataan baru mencapai 25 – 50% dari aktivitas sebelum bencana • Perlu kebijakan pemerintah daerah yang memihak bagi pemberdayaan dan pengembangan UMKM utamanya dibidang akses 	Penelitian ini mengkaji mengenai dampak bencana terhadap suatu sektor, sehingga kontribusi dalam penelitian Dampak Bencana Lumpur Sidoarjo terhadap Sistem Kegiatan Perikanan ialah sebagai acuan dalam mengkaji dampak dalam suatu sektor serta acuan dalam pembuatan strategi dari suatu permasalahan.

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil	Kontribusi dalam penelitian
		Kabupaten Situbondo.			permodalan, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan produk dan ajringan pemasaran.	
Yuliandari, 2012	Perubahan Struktur dan Dampak Ekonomi Akibat Bencana di Provinsi DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelusuri pola perubahan pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi sebelum dan sesudah bencana gempa di Provinsi DIY. 2. Mengukur keterkaitan ekonomi antar sektor sebelum dan sesudah gempa. 3. Mengetahui dampak ekonomi pasda gempa untuk melihat backward impact dari investasi yang dilakukan dalam rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terdampak. 4. Mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam pemulihan ekonomi pasca bencana seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode ekonometrika • Metode input output (IO) • <i>Social Accounting Matrix (SAM)</i> • <i>Computable General Equilibrium (CGE)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Output produksi • Tenaga kerja • Pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur ekonomi sebelum dan setelah bencana gempa di DIY cenderung tetap. • Sektor kunci sebelum dan setelah bencana mengalami perubahan. • Bencana alam memiliki pengaruh terhadap perubahan sektor kunci meskipun kecil. • Dampak yang tercipta akibat bencana alam cukup besar. Kerugian dampak outputnya sebesar Rp 11 triliun (41%), dampak pendapatan Rp 2,2 triliun (44%) dan dampak tenaga kerja sebesar 503 ribu tenaga kerja (23%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu analisis pada penelitian ini digunakan dalam penelitian dampak lumpur sidoarjo terhadap kondisi sosial dan ekonomi, yakni analisis sebelum dan sesudah. • Penelitian ini mengkaji mengenai dampak yang juga sama pada penelitian Dampak Bencana Lumpur Sidoarjo terhadap Sistem Kegiatan Perikanan.

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil	Kontribusi dalam penelitian
Hastuti, dkk, 2004	Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi Proyek Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian Sulawesi (SAADP): Pelajaran dan Program Kredit Mikro di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai dampak sosial dan ekonomi SAADP 2. Mengetahui proses pelaksanaan SAADP di tingkat lokal yang berpengaruh pada hasil 3. Mempelajari pengalaman SAADP dalam rangka pengembangan kebijakan dan rancangan kegiatan lanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis pengukuran perubahan setiap indikator antara sebelum dan setelah adanya SAADP 	<p>Indikator output dan outcome yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat ialah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan dalam mengelola usaha • Perubahan pendapatan keluarga • Perubahan perilaku menabung • Kondisi fasilitas tempat tinggal • Kepemilikan aset 	<p>Dampak sosial ekonomi SAADP bervariasi tergantung pada wilayah penelitian. Secara total dampak SAADP adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh terhadap peningkatan wawasan berusaha adalah positif • pengaruh terhadap perubahan praktik berusaha adalah positif (5,4%), khusus untuk diversifikasi usaha berdampak negatif (-3,5%), namun keduanya tidak signifikan • dampak terhadap penambahan semua jenis wawasan berusaha tani dan praktiknya adalah positif namun signifikansinya bervariasi; • berdampak kecil terhadap perpindahan lahan garapan tetapi tidak berdampak terhadap praktik pembakaran pohon • terhadap peningkatan pendapatan nominal berdampak positif (8.8%) dan signifikan • terhadap pendapatan riil berdampak kecil (0,5%) meskipun positif, dan tidak signifikan; • terhadap dorongan untuk menabung berpengaruh positif meskipun tidak signifikan • terhadap kepemilikan aset dampaknya bervariasi dan tidak konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu analisis pada penelitian ini digunakan dalam penelitian dampak lumpur sidoarjo terhadap sistem kegiatan perikanan, yakni analisis sebelum dan sesudah. • Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijadikan referensi untuk penelitian Dampak Lumpur Sidoarjo.

2.6 Kerangka Teori



Gambar 2. 4 Kerangka Teori